KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal penjurusan SMA, komisi X: siapkan peta jalan transisi
Tanggal : Jumat, 13 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Penjurusan SMA

Komisi X: Siapkan Peta Jalan Transisi


FOTO: DPR.GO.ID

Dedi Wahidi

ANGGOTA Komisi X DPR Dedi Wahidi meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan peta jalan masa transisi jika penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan di tingkat SMA pada tahun ajaran 2027/2028. Peta jalan itu untuk memastikan penjurusan tidak membingungkan siswa, guru, dan wali siswa.

Dedi menegaskan, peta jalan itu setidaknya memuat tahapan sosialisasi, penyesuaian kurikulum, pemetaan kebutuhan dan distribusi guru, kesiapan sarana dan prasarana, hingga mekanisme penentuan jurusan siswa. Pemerintah juga perlu memberi waktu yang cukup bagi sekolah untuk menyesuaikan diri sebelum kebijakan berlaku secara nasional.

Selain itu, dia mendorong Kemendikdasmen membuka secara transparan argumentasi akademik dan hasil evaluasi terhadap sistem pembelajaran tanpa penjurusan yang selama ini diterapkan di sekolah. Evaluasi itu untuk memastikan perubahan kebijakan benar-benar menjawab persoalan mendasar yang ada di dunia pendidikan nasional.

Dedi ingin kebijakan itu didasarkan pada data dan evaluasi yang terbuka. Pemerintah wajib menjelaskan secara gamblang apakah sistem tanpa penjurusan selama ini berdampak terhadap penguasaan pengetahuan dasar, kemampuan literasi, dan numerasi, sains. "Tentunya juga kesiapan lulusan ketika memasuki perguruan tinggi," terangnya, Kamis (12/11/2026).

Dia memahami salah satu pertimbangan pengembalian penjurusan adalah masukan perguruan tinggi soal penguasaan pengetahuan dasar mahasiswa baru. Namun, perubahan kebijakan pendidikan berskala nasional tidak boleh hanya didasarkan pada keluhan atau respons terhadap persoalan tertentu. Melainkan harus melalui kajian yang terukur dan objektif.

Pemerintah, lanjut Dedi, perlu mengantisipasi kesenjangan kesiapan antarsekolah. Pasalnya, tidak semua SMA punya laboratorium, tenaga pendidik, dan sarana belajar memadai untuk penjurusan. Jangan sampai sekolah di daerah tertinggal tidak sesiap sekolah di perkotaan. Peta jalan transisi wajib menjawab kesenjangan itu, termasuk pemerataan guru dan laboratorium.

Dedi menambahkan, Komisi X akan mencermati rencana itu melalui fungsi pengawasan. Kemendikdasmen diharapkan segera membuka rancangan peta jalan dan hasil kajian kepada publik agar semua pihak punya pemahaman sama. "Waktu persiapan harus dimanfaatkan untuk menyiapkan sekolah, guru, siswa, dan orang tua, bukan hanya aturan," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR dari PKS Abdul Fikri Faqih turut merespons positif rencana pengembalian penjurusan di tingkat SMA. Selanjutnya, agar relevan dengan tuntutan zaman, perlu ada inovasi berupa sistem penjurusan hibrida (mayor-minor) yang memadukan fondasi keilmuan dasar dengan kompetensi lintas disiplin. ■ PYB